BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asia Timur merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari beberapa negara maju dan karena itu juga Asia Timur tidak memiliki sebuah organisasi regional. Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong, Jepang, Makau, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan dan Taiwan adalah bagian dari Asia Timur yang mana Asia Timur memiliki kepadatan penduduk mencapai 230 per km^2 (http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Timur diakses pada tanggal 28 Juni 2014).

Karena persaingan antar negara-negara di kawasan Asia Timur yang mana beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang dan Korea yang memiliki nama di dunia internasional, maka sulit terciptanya sebuah persatuan disana. Terkadang konflik juga muncul antar negara-negara tersebut yang membuat dunia internasional ikut menyelesaikannya. Intervensi Amerika Serikat tentunya juga muncul karena Tiongkok adalah salah satu negara yang menjadi saingan utama Amerika dalam perekonomian dunia.

Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan dua anggota Dewan Keamanan Tetap PBB yang tentunya memiliki kekuatan di kancah dunia internasional. Peluang usaha demi memenuhi kepentingan nasionalnya pasti akan dicari dan digunakan semaksimal mungkin. Seperti halnya dengan negara-negara Timur Tengah yang mempunyai banyak cadangan minyak yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara industri seperti Amerika dan Tiongkok.

Timur Tengah adalah salah satu kawasan yang rentan akan konflik. Setiap tahun terjadi pergejolakan di negara-negara Timur Tengah. Hal ini sudah menjadi bahasan Ilmu Hubungan Internasional secara turun temurun dan belum pernah ada penyelesaiannya. Kawasan Timur Tengah terdiri dari negara-negara Arab yang setiap negaranya memiliki keinginan untuk berada dalam satu kesatuan, namun pada kenyataannya kepentingan nasional tiap negara menjadikan negara-negara Timur Tengah saling bersitegang (Lenczowsky, 2003:381).

Selain faktor perbedaan yang muncul dalam internal kawasan Timur Tengah sendiri, juga ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal ini muncul karena melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki negara-negara Timur Tengah, terutama minyak bumi. Negara-negara maju berebut untuk mengadakan kerjasama dengan negara-negara penghasil minyak bumi di Timur Tengah sehingga perseteruan antar negara maju tersebut memancing persaingan negara-negara Timur Tengah untuk menjadi yang terbaik.

Iran adalah salah satu negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Iran memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga banyak negara yang menginginkan melakukan kerjasama dengan negara ini. Selain itu, Iran juga melakukan pengembangan nuklir yang diperoleh dari Amerika Serikat dengan tujuan riset nuklir dengan kekuatan hanya 5 megawatt yang mulai beroperasi pada tahun 1967 (http://arifnurcahyo-janisary.blogspot.com/ 2011/12/nuklir-iran-siapa-yang-menanam-angin.html diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Untuk membatasi pengembangan senjata nuklir di dunia, dibentuk perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir diantara negara-negara pemilik nuklir yang diatur melalui *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1968, namun Iran baru menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 1970. Selain NPT, Iran juga menandatangani *Safeguards Agreement* dengan *International Atomic Energy Agency* pada tahun 1974 yang bertujuan agar badan dunia dapat mengawasi pengembangan program nuklir Iran (http://www.fas.org/nuke/guide/iran/nuke/ diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Iran terus melakukan pengembangan program nuklirnya dibawah pemerintahan Shah Iran dengan melakukan beberapa bentuk kerjasama dengan perusahaan Eropa di Jerman dan Perancis. Pengembangan nuklir terus berjalan hingga terhenti pada tahun 1979 saat terjadi Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini.

Selama pemerintahan Khomeini, proyek pembangunan reaktor nuklir dihentikan karena dianggap merupakan bentuk pemenuhan ambisi Shah semata yang mana menghabiskan dana lebih dari 30 milyar dolar, padahal pembangunan beberapa reaktor nuklir sudah hampir selesai. Reaktor Bushehr 1 sudah selesai sekitar 90% dan 60% peralatannya telah dipasang, serta Reaktor Bushehr 2 sudah mencapai 50%. Selain karena dana yang digunakan sangat besar dalam mengembangkan nuklir di Iran, Perdana Menteri Mehdi Bazargan juga menganggap bahwa Iran tidak membutuhkan energi nuklir bersamaan dengan krisis keuangan di Iran dan terjadi ketegangan hubungan Iran dengan barat, maka dari itu pembangunan reaktor nuklir di Iran

dihentikan (http://www.informationclearinghouse.info/article30177.htm diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Dalam keadaan Iran yang masih rentan karena baru terjadinya revolusi, Irak melakukan penyerangan dengan tujuan untuk menguasai terusan Shat Al-Arab, wilayah Kurdistan, Pulau Abu Musa, Tunbs besar dan kecil serta mencegah berkembangnya Revolusi Islam di kawasan teluk Persi sehingga terjadi perang antara kedua negara dari tahun 1980-1988 yang menyebabkan kerusakan pada kedua reaktor nuklir Iran karena dibom oleh Irak. Pengeboman dilakukan sebanyak enam kali, yaitu Maret 1984, Februari 1985, Maret 1985, Juli 1986 dan November 1987 dua kali. Karena hal tersebut, reaktor Bushehr 1 dan Bushehr 2 mengalami kerusakan berat, namun untungnya peralatan utama reaktor belum sempat dipasang dan masih disimpan di Italia dan Jerman (Danziger, 2005:405-406).

Usaha untuk memperbaiki reaktor nuklir Bushehr 1 dan 2 telah banyak dilakukan. Pertama Iran meminta bantuan pada *Krafwerk Union* sebuah perusahaan Jerman namun ditolak karena intervensi Amerika Serikat, kedua pemerintah Iran meminta *Kraftwerk Union* mengirim komponen-komponen reaktor dan dokumen tekhnisnya karena Iran telah membelinya, namun pengiriman juga gagal sehingga Iran meminta kompensasi sebesar $5,4 milyar. Hingga akhir tahun 1980 belum ada satupun usaha yang berhasil untuk memperbaiki kedua reaktor tersebut. Bantuan yang diajukan perusahaan konsorsium Jerman, Spanyol dan Argentina dibatalkan karena tekanan Amerika Serikat, begitupun dengan rencana *National Institute of Industry and*

Nuclear Equipment dari Spanyol untuk meyelesaikan reaktor nuklir Iran digagalkan oleh Amerika Serikat. Iran mencoba membeli peralatan dari Italia, Republik Ceko dan Polandia namun tekanan Amerika Serikat berhasil menggagalkan kembali keinginan Iran tersebut (http://www.wiseinternational. org/node/2859 diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Pada tahun 1990, Iran bekerjasama dengan Rusia untuk memperbaiki Reaktor Bushehr 1, namun akhirnya dibatalkan karena masalah keuangan. Bantuan pertama yang didapat Iran adalah pada tahun 1991 dari Tiongkok berupa kiriman pasokan material, uranium hexafluoride, tetra fluoride dan uranium dioxide dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Hal ini tidak diketahui oleh IAEA dan merupakan awal mula bentuk dukungan Tiongkok terhadap program nuklir Iran (Parillo,2006:2).

Berdasarkan pertimbangan karena hubungan Iran dan barat memburuk, krisis keuangan di Iran serta kekacauan pasca peperangan dengan Irak, maka pada masa pemerintahan Rafsanjani sekitar tahun 1995, pengembangan program nuklir ini kembali dilanjutkan, begitu juga pada masa kepemimpinan Khatami. Namun pada tahun 2003 masalah mengenai pengembangan program nuklir di Iran mulai muncul karena laporan dari pihak oposisi Iran yang diasingkan bahwa Iran melakukan pengembangan program nuklir rahasia dan tidak aman serta disembunyikan dari para petugas Badan Energi Atom Internasional atau *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Karena hal inilah sehingga terjadi krisis nuklir di Iran (Parillo, 2006:2).

Tekanan demi tekanan Iran dapatkan karena program nuklirnya. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi mengenai program nuklir Iran. Resolusi tersebut:

1. Resolusi 1696 pada 31 Juli 2006 yang berisi bahwa Iran harus menuruti langkah-langkah yang disarankan oleh IAEA yang mana dapat meyakinkan bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai dengan melaporkan segala aktifitas dan menghimbau kepada seluruh negara untuk tidak membantu Iran dalam program nuklirnya dengan batas waktu hingga 31 Agustus 2006.

   Resolusi ini dikeluarkan karena Iran tidak melaporkan program nuklirnya kepada IAEA secara jelas dan Iran tetap melanjutkan pengayaan uraniumnya. Resolusi ini dibahas di Paris tanggal 12 Juli 2006 oleh anggota Dewan Keamanan Tetap PBB dan Jerman serta Uni Eropa.
2. Resolusi 1737 pada 23 Desember 2006 yang berisi himbauan kepada Iran untuk melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengayaan uranium kepada IAEA dan himbauan kepada seluruh negara agar tidak menyuplai, menjual atau mentransfer apapun yang akan berkontribusi pada pengembangan nuklir Iran, segala barang yang akan diperdagangkan harus sepengetahuan IAEA dan resolusi ini berlaku selama 60 hari.

   Iran tetap tidak menggubris resolusi yang dikeluarkan DK PBB yang pertama hingga akhirnya resolusi kedua ini pun dikeluarkan. Sikap Iran yang tidak mengikuti saran-saran IAEA membuat DK PBB terus memberikan tekanan kepada Iran.

3. Resolusi 1747 pada 24 Maret 2007 yang berisi sanksi terhadap Iran antara lain mengenai larangan melakukan perdagangan senjata, pembekuan asset 28 orang dan organisasi yang berkaitan dengan program nuklir dan permintaan terhadap negara-negara agar memberlakukan larangan bepergian terhadap orang-orang yang dikenai sanksi (travel ban). Resolusi ini juga memberikan sanksi ekonomi kepada Iran yaitu dengan melarang semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk tidak memiliki komitmen baru dalam hal bantuan keuangan atau pinjaman untuk Iran.
4. Resolusi 1803 pada 3 Maret 2008 yang berisi penegasan kembali sanksi yang ada pada resolusi 1747 karena Iran tidak menunjukkan tanda-tanda akan bekerjasama dengan IAEA.
5. Resolusi 1835 pada 27 September 2008 yang berisi penegasan terhadap keempat resolusi sebelumnya karena sikap Iran yang tidak menghentikan pengayaan uraniumnya.
6. Resolusi 1929 pada 9 Juni 2010 yang berisi pemberlakuan embargo senjata ke Iran, larangan Iran dalam kegiatan yang berhubungan dengan misil balistik, pemeriksaan resmi dan memperpanjang pembekuan aset terhadap IRGC (*Iranian Revolutionary Guard Corps*) dan jalur pelayaran Republik Islam Iran.
7. Resolusi 1984 pada 8 Juni 2011 yang isinya menekankan pentingnya penilaian yang kredibel dan obyektif, analisis dan rekomendasi dalam laporan panel ahli. Itu menentukan bahwa proliferasi senjata pemusnah massal merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional

8. Resolusi 2049 pada 7 Juni 2012 merupakan perpanjangan dari resolusi 1984.
9. Resolusi 2105 pada 5 Juni 2013 berupa penekanan bagi resolusi-resolusi sebelumnya. (https://www.armscontrol.org/factsheets/Security-Council-Resolutions-on-Iran diakses pada tanggal 4 Mei 2014)

Kesembilan resolusi ini tentunya didukung oleh Dewan Keamanan Tetap maupun tidak tetap PBB, namun ternyata Tiongkok dan Rusia sebagai anggota Dewan Keamanan tetap PBB yang ikut merumuskan resolusi 1747 atau resolusi ketiga yang dikeluarkan DK PBB memberikan dukungan terhadap program nuklir Iran dan mengharapkan masalah nuklir Iran ini dapat diselesaikan secara damai melalui jalan diplomasi. Tiongkok dan Rusia menganggap bahwa jalur diplomasi adalah cara yang tepat untuk mengatasi sikap Iran yang keras mengenai program nuklirnya (http://www.pelita. or.id/baca.php?id=38741 diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki kerjasama cukup panjang dan stabil dengan Iran. Hal ini terjadi karena Tiongkok adalah negara yang memiliki keterbatasaan sumber daya alam energi sehingga negara ini tergantung pada impor minyak dan gas dari negara lain. Tiongkok akan terus melakukan kerjasama-kerjasama dengan negara-negara penghasil energi, yang mana Iran adalah salah satu rekan terkuat Tiongkok.

Di bidang energi, Tiongkok memiliki investasi mencapai $63 milyar di Iran pada tahun 2009 dan juga Iran menjamin pasokan gas ke Tiongkok selama 25 tahun dihitung sejak tahun 2004. Tiongkok juga mengimpor minyak dari Iran

mencapai 12% kebutuhan di dalam negerinya sehingga segala bentuk tekanan barat terhadap hubungan Tiongkok dan Iran tidak dapat menghentikan kerjasama kedua negara ini (http://www.globalissues.org/news/2010/07/30/6457 diakses pada tanggal 5 Mei 2014).

Tepat di tahun 2003, Hu Jintao terpilih menjadi Presiden Tiongkok. Hal ini bertepatan dengan munculnya masalah nuklir di Iran yang dianggap sebagai upaya membuat senjata. Tiongkok yang juga adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki sikap yang berbeda dengan anggota lainnya selain Rusia karena Tiongkok memberikan dukungan terhadap pengembangan nuklir di Iran sama seperti Rusia. Beberapa kebijakan luar negeri di awal kepemimpinan Hu Jintao menjelaskan sikap positif Tiongkok terhadap hal tersebut.

Hu Jintao memberikan pernyataan bahwa Tiongkok selalu mendukung pengembangan nuklir Iran yang mana berguna untuk membangun pembangkit listrik di Iran. Hu Jintao berharap masalah nuklir ini dapat diselesaikan melalui cara diplomasi tanpa harus memberikan sanksi kepada Iran. Iran adalah negara yang menandatangani Traktak non-Proliferasi Nuklir, Konvensi Senjata Biologi dan Kovensi Sejata Kimia sehingga wajib untuk tidak mengembangkan senjata nukir. Iran jelas telah membantah melakukan pengembangan ataupun memiliki senjata pemusnah massal sehingga organisasi terkaitlah yang mempunyai wewenang menyelesaikan masalah keraguan ini melalui cara negosiasi, konsultasi dan dialog dengan negara Iran karena seharusnya non-proliferasi tidak menghalangi pengembangan nuklir

yang bertujuan damai (http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t28673.htm diakses pada tanggal 1 Juni 2014).

Di tahun 2007 saat Hu Jintao melakukan diskusi mengenai beberapa isu dengan Bush, Presiden Amerika saat itu, terkait nuklir Iran, Tiongkok akan tetap bersikeras menyelesaikan isu nuklir iran melalui jalur negosiasi diplomatik secara damai. Di tahun 2007 sendiri telah dikeluarkan total 3 resolusi DK PBB mengenai isu nuklir Iran, namun Tiongkok tetap pada sikapnya yang menolak memberikan sanksi pada Iran. Menurut Hu dengan menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi tentu akan melindungi perdamaian dan stabilitas regional yang pasti akan memenuhi kepentingan setiap pihak yang terkait (http://english.pravda.ru/news/world/06-12-2007/102399-nuclear_questions-0/#.U5S0eHb_i00 diakses pada tanggal 2 Juni 2014).

Dalam tindakan yang dilakukan oleh DK PBB mengenai masalah nuklir Iran, Tiongkok memiliki tiga prinsip, yaitu:

1. Tindakan yang diambil harus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kesepakatan NPT. Dalam hal ini Iran adalah anggota NPT dan telah bersedia bekerja dengan IAEA sehingga memiliki hak menggunakan energi nuklir damai.
2. Tindakan DK PBB harus menciptakan suasana yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah terutama daerah teluk.

3. Membantu pemulihan perekonomian dunia dan menghindari dampak pada kehidupan normal rakyat Iran dan ekonominya serta tidak mengganggu hubungan antara Iran dengan negara lain.

Tindakan yang diambil DK PBB harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi, memiliki sasaran yang jelas dan harus memperkuat upaya diplomatik dalam menyelesaikan masalah nuklir Iran (Nugroho, 2012:13).

Sejak tahun 2006 hingga 2009, Tiongkok terus memberikan dukungan terhadap perkembangan nuklir Iran secara intensif , mulai dari penolakan terhadap sanksi yang diberikan oleh DK PBB padahal dalam hal ini Tiongkok juga ikut merumuskan isi dari resolusi yang dikeluarkan tersebut, hingga penyediaan reaktor, pelatihan tenaga ahli dan pendampingan dalam pengoperasian reaktor nuklir. Dalam perkembangannya, ternyata di tahun 2010, Tiongkok memberikan perubahan dalam sikapnya menghadapi sanksi PBB terhadap program nuklir Iran. Tiongkok mendukung pemberian sanksi kepada Iran mengenai masalah program nuklirnya. Hal ini dikarenakan Tiongkok menginginkan Iran agar merubah sikapnya yang sangat tidak bersahabat dengan IAEA agar melaporkan semua aktifitas nuklirnya di Iran bilamana memang tidak ada indikasi untuk membuat senjata nuklir (http://nasional.kompas.com/read/2010/03/24/14001279/China.dan.Rusia.Desak.Iran.Ubah.Sikap diakses pada 5 Mei 2014).

Pasca perubahan sikap Tiongkok, Iran tidak lantas memutuskan kerjasamanya dengan Tiongkok karena secara positif Tiongkok masih mendukung secara penuh program nuklir Iran selama Iran dapat bekerjasama

dengan IAEA. Tiongkok tetap meminta agar masalah program nuklir Iran ini dapat diselesaikan dengan cara diplomasi tanpa harus terus memberikan sanksi kepada Iran.

Memang tidak ada bantuan secara langsung dari Tiongkok terhadap Iran pasca keputusan Tiongkok mendukung resolusi DK PBB, namun setiap pertemuan yang dilaksanakan dengan tema bahasan program nuklir Iran, Tiongkok terus memberikan pernyataan yang mana Tiongkok memberikan dukungan penuh kepada Iran dalam pelaksanaan program nuklirnya, terutama setelah Iran menghentikan 20% pengayaan uraniumnya diawal tahun 2012, yang mana sanksi untuk Iran pun diperingan, seperti diperbolehkannya negara-negara mengimpor minyak kembali dari Iran (http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_program_of_Iran diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Dukungan Tiongkok di tahun 2013 disampaikan sebelum pertemuan antara Iran dan IAEA untuk membahas kembali program nuklir Iran pada tanggal 12 Februari 2013. Sebelumnya Iran telah melakukan negosiasi dengan IAEA pada tanggal 16 hingga 17 Januari 2013 namun belum mendapat kesepakatan apapun, hingga akhirnya dilaksanakan pertemuan putaran kedua yang juga belum menemukan kesepakatan. Setelah dilakukan beberapa pertemuan yang juga masih belum menemukan kesepakatan mengenai sengketa program nuklir Iran, pada tanggal 11 November 2013 Iran dan IAEA menandatangani kesepakatan yang mana IAEA akan mendekati dua instalasi nuklir Teheran dalam waktu tiga bulan. Yang juga perlu dilakukan Iran selama 3 bulan adalah melaporkan informasi mengenai reaktor-reaktor penelitian baru, pabrik-pabrik

tambahan untuk pengayaan uranium, 16 basis untuk melayani pabrik-pabrik listrik tenaga nuklir dan teknologi mengayakan uranium dengan laser (http://vovworld.vn/id-id/Berita/Pemufakatan-kerjasama-antara-IAEA-dengan-Iran-pada-permulaannya-mencapai-hasil-positif/201682.vov diakses pada tanggal 6 Mei 2014).

Peneliti merasa sikap Tiongkok terhadap Iran cukup menarik untuk dibahas secara lebih dalam dan menjadikan masalah ini sebagai penelitian untuk pembuatan skripsi dengan judul:

"Dukungan Tiongkok terhadap Pengembangan Nuklir di Iran Pada Masa Pemerintahan Presiden Hu Jintao (2003-2013)."

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu:

1. Politik Internasional, membahas mengenai interaksi politik di kancah dunia internasional terutama dengan cara diplomasi dan juga dampaknya yang mana bisa menjadi sebuah kerjasama ataupun konflik.
2. Pemikiran Politik Islam, membahas dunia politik dari pandangan syariat Islam yang digunakan oleh negara-negara Islam seperti negara-negara Timur Tengah.
3. Analisa Politik Luar Negeri, membahas mengenai politik luar negeri secara mendalam sehingga dapat dilakukan analisa menggunakan beberapa fasilitas yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana dukungan Tiongkok terhadap pengembangan nuklir di Iran pada masa pemerintahan Hu Jintao dari tahun 2003 hingga tahun 2013?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana hubungan luar negeri antara Iran dan Tiongkok pada masa pemerintahan Hu Jintao (2003-2013)?
2. Apakah kepentingan Tiongkok sehingga mendukung pengembangan nuklir di Iran?
3. Bagaimana respon Iran terhadap dukungan Tiongkok pada pengembangan nuklirnya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana dukungan Tiongkok terhadap program nuklir Iran dan apa kepentingan Tiongkok terhadap dukungannya tersebut sejak tahun 2003 hingga 2013 saat PBB memberikan sanksi terhadap Iran melalui resolusinya. Tiongkok merupakan negara *great power* dan juga salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga sikap yang diberikan Tiongkok akan menjadi sebuah dukungan yang dibutuhkan

Iran. Dengan begitu tentunya penelitian ini akan menjelaskan juga respon Iran terhadap dukungan Tiongkok tersebut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai hubungan luar negeri antara Tiongkok dan Iran pada masa pemerintahan Hu Jintao (2003-2013).
2. Mengetahui lebih lanjut kepentingan yang dimiliki Tiongkok sehingga mendukung pengembangan nuklir Iran.
3. Untuk mengetahui seperti apa respon Iran terhadap dukungan Tiongkok bagi pengembangan nuklirnya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi Ilmu Hubungan Internasional, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi sebagai materi yang dapat disampaikan dan juga bisa memberikan tambahan ilmu yang cukup otentik bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai sikap-sikap Tiongkok berupa dukungan terhadap pengembangan nuklir di Iran pada masa pemerintahan Hu Jintao tahun 2003 hingga 2008 serta periode kedua tahun 2008 hingga tahun 2013, juga bagaimana Iran merespon dukungan Tiongkok tersebut dan juga kerjasama kedua negara sebagai tindak lanjut atas sikap-sikap tersebut sehingga dapat

menjadi bahasan yang cukup berbobot di lingkup studi Ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai program studi Ilmu Hubungan Internasional dari segi kerjasama internasional yang mana kerjasama kedua negara dapat terjadi karena adanya kepentingan antar negara.

Bagi Lembaga Akademik, diharapkan penelitian bisa menjadi referensi dan menjadi sumbangan data mengenai hubungan Tiongkok dan Iran mengenai pengembangan nuklir di Iran.

Bagi Mahasiswa dan Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi untuk lebih memahami bagaimana hubungan Iran dan Tiongkok melalui sikap-sikap dan motif Tiongkok dalam menanggapi pengembangan nuklir Iran, baik dari segi positif maupun negatif serta secara formal maupun informal.